

**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Tugas Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Administrasi Publik)

Oleh

CEZZYA FEBIOLA SINAGA

NPM 2416041105



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Grand Theory – The New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003) 17	
2.2.2 Middle Theory – Implementing Public Policy (Edwards III, 1980)	19
2.2.3 Applied Theory – Whose Reality Counts? (Chambers, 1997)	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	22
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	31
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional sebagai salah satu masalah sosial yang kompleks. Masalah ini tidak hanya melibatkan pendapatan rendah atau kemampuan konsumsi yang terbatas, tetapi juga mencakup hambatan akses ke layanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Sebagai fenomena yang multidimensional, kemiskinan meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling terkait dan memerlukan strategi komprehensif untuk diatasi.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif pengurangan kemiskinan sejak era Orde Baru hingga saat ini, mulai dari subsidi, bantuan pangan, hingga transfer uang tunai. Pada masa Orde Baru, fokus kebijakan pengentasan kemiskinan lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa manfaat pembangunan akan merata di semua lapisan masyarakat. Namun, pendekatan tersebut terbukti tidak sepenuhnya efektif karena manfaatnya tidak sepenuhnya mencapai kelompok berpendapatan rendah. Sejak era reformasi, strategi pengentasan kemiskinan bergeser ke arah yang lebih partisipatif dengan perhatian langsung pada masyarakat miskin. Sejak itu, berbagai jenis bantuan sosial terus dikembangkan sesuai dengan evolusi paradigma pembangunan dan dinamika sosial ekonomi di Indonesia.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai langkah pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dampak krisis ekonomi (Supriadi et al., 2021). Konsep BLT berlandaskan pemahaman bahwa kelompok miskin memerlukan bantuan langsung dengan efek yang segera terasa. Program ini menawarkan transfer tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), sehingga penerima bebas menggunakan dana sesuai prioritas mereka. Pendekatan ini

dianggap lebih efisien daripada bantuan berupa barang atau program padat karya yang memerlukan infrastruktur dan biaya administrasi tinggi.

Seiring berjalannya waktu, BLT mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, cakupan program diperluas untuk menangani krisis global 2008–2009. Sementara itu, di era pemerintahan Joko Widodo, BLT diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Program ini kemudian berkembang menjadi varian seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui evolusi ini, BLT menjadi komponen kunci dalam jaring pengaman sosial di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar mandiri di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini tidak hanya menekankan pengembangan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat akses ke sumber daya dan peluang yang adil. Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Pemberdayaan yang efektif bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat (Pakpahan et al., 2024). Melalui proses ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran kritis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai peningkatan kemampuan teknis, melainkan juga sebagai transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat mengontrol hidup mereka sendiri. Ada tiga dimensi utama dalam pemberdayaan, yakni dimensi personal (peningkatan kemampuan individu), interpersonal (kemampuan mempengaruhi orang lain), dan politik (kemampuan mempengaruhi kebijakan dan struktur kekuasaan). Selain itu, aspek psikologis seperti kepercayaan diri, harga diri, dan keyakinan pada kemampuan diri merupakan bagian penting dari proses ini. Hal ini penting karena kemiskinan sering disertai perasaan tidak berdaya dan rendah diri yang dapat menghalangi upaya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, BLT berpotensi sebagai pemicu yang mendorong kemandirian masyarakat. Bantuan tunai dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Namun, potensi ini hanya tercapai jika BLT dirancang dengan mempertimbangkan aspek pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang efektif harus mencakup aspek material dan psikososial agar masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47%, turun dari 8,57% pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23,85 juta orang. Meskipun mengalami penurunan, angka ini menunjukkan kerentanan sosial ekonomi yang masih tinggi dan memerlukan perhatian serta kebijakan konsisten. Penurunan ini menandakan bahwa upaya pengurangan kemiskinan terus memberikan hasil positif dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Analisis data kemiskinan menunjukkan perbedaan signifikan antarwilayah, kelompok usia, dan sektor pekerjaan. Kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat pedesaan, meskipun kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan tren kenaikan. Kawasan Indonesia Timur umumnya memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa-Bali. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan upah rendah, menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan yang belum memadai. Karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan perlu fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja masyarakat.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yaitu 10,69% atau sekitar 941,23 ribu jiwa (BPS, 2024). Tingginya kemiskinan di Lampung dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketergantungan pada sektor pertanian berproduktivitas rendah, keterbatasan akses ke modal dan teknologi, serta lemahnya infrastruktur ekonomi. Wilayah Lampung yang sebagian besar berupa daerah pedesaan dengan basis ekonomi pertanian

menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan degradasi lahan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat.

Selain itu, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih relatif rendah, yang membatasi akses ke pekerjaan dengan upah layak. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi kemampuan masyarakat mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan usaha produktif. Akibatnya, potensi ekonomi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian provinsi memiliki 83,88 ribu jiwa penduduk miskin atau 7,68%, sedangkan Kota Metro mencatat 12,07 ribu jiwa atau 6,78%. Meskipun persentasenya lebih rendah dari rata-rata provinsi, biaya hidup tinggi di perkotaan menciptakan tantangan berupa kemiskinan urban. Masyarakat miskin di perkotaan umumnya menghadapi masalah seperti keterbatasan akses ke perumahan layak, biaya kebutuhan pokok tinggi, serta persaingan ketat di pasar kerja. Fenomena urbanisasi yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja memadai juga memperburuk kondisi kemiskinan di perkotaan.

Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah di Provinsi Lampung cukup mencolok. Kabupaten Lampung Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 16,92%, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat relatif lebih rendah dengan 7,22%. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan bantuan sosial seperti BLT yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Lampung Utara memiliki karakteristik geografis yang kurang menguntungkan dengan akses terbatas dan ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, sementara daerah seperti Tulang Bawang Barat memiliki infrastruktur dan diversifikasi ekonomi yang lebih baik.

Data indeks kedalaman kemiskinan (P1) Lampung tahun 2024 sebesar 1,53 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,33 menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dengan tingkat kerentanan antar rumah tangga (BPS, 2024). Nilai P1 yang relatif

rendah menandakan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan, sehingga intervensi yang tepat dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Namun, nilai P2 yang masih ada menandakan adanya kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sangat dalam dan memerlukan perhatian lebih besar.

Analisis terhadap dimensi kemiskinan di Provinsi Lampung perlu mempertimbangkan aspek *non-income poverty* seperti akses ke pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Data menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan dari sisi pendapatan mengalami perbaikan, kesenjangan dalam akses ke pelayanan dasar masih cukup besar. Kondisi ini menandakan bahwa kemiskinan tidak dapat diukur hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keterbatasan dalam menikmati hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan perlu menggunakan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemerataan akses layanan dasar.

Penelitian Supriadi et al. (2021) di Lampung menunjukkan bahwa kebijakan bantuan tunai belum berjalan optimal karena lemahnya mekanisme distribusi, keterbatasan transparansi, serta ketidaktepatan data penerima. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian masyarakat miskin tidak menerima bantuan, sementara penerima yang tidak berhak justru terdaftar. Meski demikian, program ini tetap memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendataan dan tata kelola yang perlu diperbaiki agar implementasi BLT menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Salah satu penyebab utama lemahnya pelaksanaan BLT adalah sistem basis data yang tidak diperbarui secara berkala. Kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, namun data yang digunakan sering kali tidak mencerminkan perubahan tersebut. Keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi juga memperburuk akurasi data. Kurangnya transparansi dalam proses penentuan penerima dan penyaluran bantuan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi menjadi kunci

penting bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi juga untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial.

Penelitian Kumala et al. (2024) di Bandar Lampung menegaskan bahwa penyaluran BLT masih belum efektif karena pemerintah menggunakan data lama yang tidak relevan. Banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata, sedangkan sebagian keluarga mampu masih tercatat sebagai penerima. Dalam beberapa kasus, distribusi BLT juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik, sehingga menurunkan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga pelaksana di tingkat daerah agar BLT benar-benar tepat sasaran.

Faktor politik lokal juga berpengaruh terhadap implementasi BLT di beberapa daerah, di mana program bantuan sosial sering kali dijadikan alat untuk memperoleh dukungan politik. Praktik seperti ini dapat menggeser tujuan utama BLT dari pengurangan kemiskinan menjadi kepentingan kekuasaan. Akibatnya, efektivitas program menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah. Selain itu, politisasi bantuan sosial berpotensi menimbulkan kecemburuan dan perpecahan sosial di kalangan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pengawasan dan transparansi menjadi aspek yang mutlak diperlukan untuk menjaga integritas program.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Pratama et al. (2024) dalam studi di Palembang yang menunjukkan bahwa implementasi BLT belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Lemahnya integrasi kelembagaan, komunikasi yang kurang antara pemerintah dan masyarakat, serta rendahnya literasi penerima bantuan turut memperparah kondisi tersebut. Koordinasi antar instansi yang tidak berjalan baik membuat distribusi BLT menjadi lambat dan tidak merata. Hal ini menegaskan bahwa persoalan BLT tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan menyangkut tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat miskin menggambarkan adanya bentuk marginalisasi yang cukup kuat. Kelompok miskin sering kali tidak memiliki

akses terhadap proses pembuatan kebijakan dan tidak memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Kurangnya literasi mengenai mekanisme bantuan sosial menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan menerima kondisi yang ada tanpa kritik. Oleh karena itu, peningkatan literasi sosial dan politik menjadi penting agar masyarakat mampu berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program bantuan. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat juga perlu diperkuat agar aspirasi dan umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan.

Fatimawati (2022) menekankan bahwa BLT merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial yang penting, namun tanpa penguatan aspek kelembagaan dan pemberdayaan, program ini cenderung bersifat sementara. BLT seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga sebagai langkah awal menuju kemandirian masyarakat. Untuk itu, perlu integrasi antara BLT dan program pemberdayaan agar masyarakat memiliki peluang mengembangkan potensi ekonomi. Pendekatan seperti ini dapat mengubah paradigma bantuan sosial dari sifat karitatif menjadi investasi sosial yang berkelanjutan.

Rela et al. (2024) menambahkan bahwa di era digital, pemberdayaan masyarakat menuntut adanya akses informasi, partisipasi aktif, serta peningkatan kapasitas berbasis teknologi. BLT tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen bantuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan agar masyarakat penerima dapat bertransformasi menjadi mandiri dan produktif. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan akurasi data penerima, transparansi penyaluran, dan efisiensi administrasi program. Namun, tantangan yang muncul adalah masih adanya kesenjangan digital di masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.

Pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi BLT membawa berbagai keuntungan seperti monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara real-time. Pemerintah dapat memantau penyaluran bantuan, mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan perbaikan dengan cepat. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital dalam program bantuan sosial bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi. Karena itu, peningkatan literasi

digital menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk menerima bantuan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Konteks pemberdayaan di era digital membuka peluang besar untuk menciptakan model pemberdayaan yang lebih inovatif. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan pasar, menyediakan pelatihan daring, serta membangun jejaring antar kelompok masyarakat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan proses evaluasi program menjadi lebih akurat dan transparan. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi dan dampak BLT di Provinsi Lampung menjadi penting untuk menilai sejauh mana program ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini juga relevan karena Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas dengan basis ekonomi pertanian yang kuat, serta keberagaman etnis dan budaya yang tinggi. Lampung merupakan salah satu provinsi tujuan transmigrasi yang memiliki potensi sosial besar sekaligus tantangan dalam hal pemerataan pembangunan dan integrasi sosial. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Lampung dilihat dari segi ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan transparansi program?
2. Bagaimana pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Lampung berdasarkan ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan transparansi program.
2. Mengkaji pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan studi administrasi publik, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Lampung, dalam meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih berdampak pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pelaksanaan dan pengaruh program Bantuan Langsung Tunai telah dilakukan secara luas oleh para peneliti dengan pendekatan serta fokus yang beragam. Kajian-kajian tersebut berperan sebagai sumber referensi utama untuk memahami dinamika implementasi BLT dan dampaknya pada masyarakat. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik kajian ini. Para peneliti ini menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan BLT.

Tabel 1. Kajian Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ummi Nurul Azizah (2024)	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Janti Slahung Ponorogo	Kajian ini menerapkan teori implementasi kebijakan dari George Edward III dengan empat indikator pokok, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan kajian menunjukkan bahwa program BLT telah berjalan lancar pada sebagian besar indikator, tetapi masih ada kekurangan besar di bidang komunikasi, khususnya dalam penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Sosialisasi program belum

			merata, sehingga banyak warga yang belum paham tentang prosedur dan syarat penerima BLT. Dari sisi pengaruhnya, kajian ini menemukan bahwa bantuan BLT Rp 300.000 per bulan untuk 28 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Janti hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan belum mampu menutupi seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat. Kajian ini juga mendeteksi munculnya kecemburuan sosial karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan.
2	Yasi Ali Anbiya (2025)	Pelaksanaan Program BLT Desa Ngrupit Dan Dampaknya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan penekanan pada fenomenologi untuk menelaah implementasi program BLT di Dusun Gentan, Desa Ngrupit. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas program BLT sangat ditentukan oleh kapasitas masyarakat dalam menangani dana secara otonom dan inovatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman keuangan yang

			memadai untuk mengoptimalkan keuntungan dari bantuan tersebut. Hambatan pokok yang terdeteksi adalah minimnya bimbingan dan penyebaran informasi tentang cara mengelola dana secara produktif. Sebagian besar masyarakat masih membelanjakan dana BLT hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa memperhitungkan potensi produktivitas dalam jangka waktu yang lebih lama. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penilaian rutin oleh pemerintah guna menjamin keefektifan program serta penyempurnaan proses distribusi.
3	M Adi Pratama Putra, Alfinda Adellia Dirli, Wilda Andriani, Reza Mauldy Raharja (2023)	Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat	Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur dan data lapangan untuk menilai pengaruh program BLT pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BLT menawarkan peluang signifikan dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas akses masyarakat ke layanan

			fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh tiga elemen penting, yakni rancangan program yang sesuai, proses pemilihan penerima yang tepat sasaran, serta mekanisme penyaluran yang efektif. Penelitian ini juga mengungkap hambatan dalam pelaksanaan, termasuk biaya administrasi yang besar, kesulitan dalam menjangkau kelompok yang benar, serta masalah kebijakan pada level operasional. Temuan utama lainnya adalah bahwa efektivitas BLT membutuhkan penerapan yang hati-hati berdasarkan data empiris serta sinergi yang kuat dengan program sosial lain untuk meraih hasil maksimal.
4	Raudatul Ratna Wati, Prayitno Basuki, Irwan Suriadi (2023)	Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Punia Karang Kateng	Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui analisis deskriptif yang mencakup 52 keluarga penerima bantuan BLT BBM di Lingkungan Punia Karang Kateng. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa bantuan BLT BBM senilai

		Kelurahan Punia Kecamatan Mataram	Rp 600.000, yang dibagikan dalam dua tahapan, berhasil mendukung penerima dalam memenuhi keperluan harian seperti beras, minyak goreng, serta barang rumah tangga lainnya. Penggunaan dana tersebut sesuai dengan sasaran program, yakni mempertahankan kemampuan beli masyarakat saat terjadi lonjakan harga bahan bakar minyak. Meski demikian, penelitian mengungkap bahwa walaupun bantuan ini dapat meringankan pemenuhan kebutuhan pokok, program tersebut tidak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan berkesinambungan. Besaran bantuan yang terbatas serta jangka waktu penyaluran yang cukup singkat menjadi penghalang bagi dampak program dalam jangka waktu yang lebih lama.
5	Rizaldy Tumbel, Burhanuddin	Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, serta pengumpulan

Kiyai, Rully Mambo (2021)	Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa	dokumentasi guna mengevaluasi pengaruh program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada situasi ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BLT memberikan dukungan yang terbatas bagi kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah pandemi, meskipun belum sepenuhnya mencapai efektivitas maksimal. Beberapa kendala yang mengurangi keberhasilan program meliputi ketidaktepatan data penerima, jangkauan yang belum merata sehingga sebagian masyarakat kurang mampu belum mendapat manfaat, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan keperluan oleh sejumlah penerima, serta penundaan dalam proses penyaluran tanpa informasi yang memadai. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dampak positif, seperti kenaikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan modal usaha kecil, walaupun manfaat tersebut bersifat sementara dan terbatas.
---------------------------	---	--

6	Sepriani Banawa, Sukadji Sarbi, Muzani Zulmaizar (2021)	Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa	Penelitian ini menerapkan metode evaluatif kualitatif dengan melibatkan 42 responden, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, serta aparat desa. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup kelompok kurang mampu yang tergolong belum sejahtera. Namun, hasil penting menunjukkan bahwa bantuan BLT senilai Rp 300.000 per bulan tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidup secara berarti dan hanya mencukupi kebutuhan harian. Penelitian ini juga menemukan dampak negatif, yakni ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, yang berpotensi mendorong sikap pasif serta budaya malas bekerja. Di samping itu, ada masalah ketidaktepatan penyaluran bantuan, di mana sejumlah penerima sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.
---	--	---	--

Dari kajian sebelumnya, tampak bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menghasilkan berbagai dampak bagi masyarakat. Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa BLT berguna untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi belum sepenuhnya berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Kajian-kajian tersebut juga menyoroti beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti akurasi penentuan penerima, keterbukaan informasi yang diberikan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kemungkinan munculnya ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Perbedaan penelitian ini dari kajian sebelumnya terletak pada cakupan wilayah, yakni Provinsi Lampung, serta fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama program BLT. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan dan pengaruh program, dengan memperhitungkan konteks setempat serta ciri khas sosial ekonomi masyarakat Lampung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Grand Theory – The New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003)

Teori New Public Service (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2003) muncul sebagai bentuk kritik terhadap paradigma New Public Management yang berorientasi pada efisiensi dan mekanisme pasar. “*The role of government is to serve citizens, not customers.*” (Denhardt & Denhardt, 2003) menegaskan bahwa peran pemerintah adalah melayani warga negara, bukan sekadar memperlakukan mereka sebagai pelanggan. Pandangan ini menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dalam pengelolaan sektor publik dan mengalihkan fokus dari keuntungan administratif menuju peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai (BLT), teori ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang adil, empatik, dan berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan.

Menurut Denhardt dan Denhardt (2003), pelayanan publik yang ideal harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan karena mampu membangun kepercayaan serta rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan BLT, prinsip ini tampak pada partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, mengawasi distribusi, serta mengevaluasi hasil kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, efektivitas dan legitimasi suatu kebijakan publik akan meningkat secara signifikan.

“Public servants should focus on building relationships, sharing leadership, and empowering citizens.” (Denhardt & Denhardt, 2003). Pernyataan ini menegaskan bahwa pelayanan publik masa kini harus menumbuhkan kerja sama, kepemimpinan yang inklusif, dan pemberdayaan warga. Dalam konteks Provinsi Lampung, penerapan prinsip tersebut mendorong aparatur desa untuk lebih terbuka, tanggap, dan mendengarkan aspirasi masyarakat penerima BLT. Dengan demikian, BLT tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan bantuan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Fatimawati dan Mulazid (2022) menyatakan bahwa kebijakan sosial yang berpihak kepada masyarakat kecil seharusnya dijalankan dengan prinsip partisipatif dan akuntabel. Dalam implementasi BLT, hal ini mencakup kejelasan prosedur, keterbukaan data penerima, serta komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan prinsip NPS, keberhasilan BLT tidak hanya diukur dari ketepatan penyaluran, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, teori NPS memberikan kerangka normatif untuk memahami bagaimana kebijakan publik seperti BLT sebaiknya dilaksanakan. Pemerintah berfungsi bukan sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai pelayan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar. Melalui penerapan nilai partisipasi, transparansi, dan keadilan, diharapkan pelaksanaan BLT tidak sekadar menjadi proses penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan relasi sosial dan perluasan ruang pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Middle Theory – Implementing Public Policy (Edwards III, 1980)

Teori Implementing Public Policy yang diperkenalkan oleh George C. Edwards III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasinya dijalankan. *“Implementation is the ability to forge subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired policy outcomes”* (Edwards III, 1980). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya soal menjalankan instruksi, tetapi tentang kemampuan menghubungkan berbagai unsur kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam konteks pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), para pelaksana perlu memahami dengan baik sasaran dan tujuan kebijakan agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu, sesuai target, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Edwards (1980) menguraikan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting agar pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat. Sumber daya yang memadai dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Disposisi pelaksana mencakup sikap, motivasi, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas, sedangkan struktur birokrasi berfungsi menentukan kelancaran koordinasi antarinstansi. Dalam konteks implementasi BLT di Provinsi Lampung, keempat faktor ini menjadi dasar utama dalam menjaga kejelasan informasi dan efektivitas distribusi bantuan.

“Without adequate resources, even the best policy will fail to achieve its goals.” (Edwards III, 1980). Kutipan tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik pun akan gagal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Dalam pelaksanaan BLT, hal ini tampak pada pentingnya data yang akurat, ketersediaan tenaga pelaksana di lapangan, serta keandalan sistem digital dalam menyalurkan bantuan. Ketika sumber daya terbatas, proses implementasi berpotensi mengalami keterlambatan, kesalahan administrasi, bahkan ketidaktepatan sasaran yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program.

Purnawan et al. (2022) menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang efisien dapat mempercepat proses implementasi serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Di berbagai daerah, penyederhanaan prosedur administrasi dalam penyaluran BLT terbukti mampu meningkatkan transparansi sekaligus menekan peluang penyimpangan. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu rumit cenderung memperlambat proses dan mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan demikian, teori Edwards memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan kebijakan sosial secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, teori *Implementing Public Policy* memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik seperti BLT tidak hanya bergantung pada rancangan programnya, tetapi juga pada kualitas implementasinya di lapangan. Keempat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—harus berjalan beriringan agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui perspektif ini, efektivitas pelaksanaan BLT dapat dinilai secara lebih objektif, baik dari sisi administrasi maupun dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat penerima manfaat.

2.2.3 Applied Theory – Whose Reality Counts? (Chambers, 1997)

Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1997) menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. *“The poor are not the problem; they are the solution.”* (Chambers, 1997) menggambarkan bahwa masyarakat miskin sesungguhnya memiliki kemampuan dan potensi untuk memperbaiki kehidupannya sendiri jika diberi kesempatan serta dukungan yang memadai. Pandangan ini menolak model pembangunan *top-down* yang sering kali mengabaikan realitas dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai (BLT), teori ini relevan karena bantuan tersebut seharusnya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga membuka ruang bagi penerima untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Chambers (1997) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu

mengendalikan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dalam pelaksanaan BLT, prinsip ini terlihat ketika masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program. Keterlibatan aktif tersebut menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab sosial yang lebih besar di antara warga. Oleh karena itu, BLT perlu diintegrasikan dengan berbagai program pendukung seperti pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan literasi keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan modal finansial, tetapi juga harus meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mandiri” (Pakpahan, 2024). Kutipan ini menegaskan bahwa kesuksesan pemberdayaan tidak semata bergantung pada bantuan material, tetapi juga pada penguatan aspek non-material seperti pendidikan dan kesadaran sosial. Dalam konteks BLT, upaya pemberdayaan akan lebih efektif jika disertai dengan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan usaha kecil yang dapat meningkatkan produktivitas penerima bantuan. Dengan demikian, BLT tidak berhenti sebagai program konsumtif, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

Rela et al. (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada era digital menuntut kemampuan untuk mengakses serta memanfaatkan teknologi. *“Digital participation allows marginalized communities to have a voice in governance”* (Rela et al., 2024). Melalui teknologi digital, partisipasi publik dapat diperluas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sosial semakin terjamin. Dalam konteks BLT, penggunaan sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memantau penyaluran bantuan dan memastikan keadilan dalam distribusinya. Dengan begitu, pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui literasi digital yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jannah (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial bergantung pada kesesuaian antara kebijakan dengan konteks sosial masyarakat penerima. Program seperti BLT akan berjalan efektif apabila pelaksanaannya mempertimbangkan nilai-nilai budaya, kondisi sosial, serta dinamika lokal yang

ada di masyarakat. Dalam konteks Provinsi Lampung, hal ini penting mengingat keberagaman sosial dan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam pelaksanaan BLT dapat memperkuat legitimasi program serta menjamin keberlanjutan proses pemberdayaan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, teori Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa kebijakan sosial seperti BLT harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan sejati tercapai ketika masyarakat memiliki kendali terhadap sumber daya dan mampu mengambil keputusan bagi kehidupannya sendiri. Program BLT akan mencapai hasil optimal apabila didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat dan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan sosial tidak hanya mengurangi kemiskinan sementara, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

2.3 Kerangka Berpikir

Kemiskinan di Provinsi Lampung masih menjadi isu yang mendasar dalam pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi, yang mencapai 10,69% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum merasakan kesejahteraan secara merata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melaksanakan berbagai program sosial. Salah satu program tersebut adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan tingkat pemberdayaan masyarakat yang menerima bantuan.

Dalam menganalisis dinamika pelaksanaan dan dampak dari program BLT, penelitian ini mengacu pada tiga kerangka teori utama. Pertama, Teori Administrasi Publik Baru (*New Public Service*) yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt

(2003) menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan publik, bukan sebagai pengendali masyarakat. Prinsip "*serving, not steering*" menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks BLT, teori ini menyoroti pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses distribusi bantuan. Nilai-nilai demokratis dan pelayanan yang humanis menjadi landasan agar kebijakan sosial benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

Kedua, Teori Implementasi Kebijakan Publik yang diusulkan oleh George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan BLT, komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem pendataan yang akurat juga berperan penting dalam mencapai sasaran kebijakan. Selain itu, komitmen dan integritas aparatur sangat penting untuk menghindari penyimpangan administratif.

Ketiga, Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan oleh Robert Chambers (1997) menekankan bahwa pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Program bantuan seperti BLT harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program. Hal ini juga mendorong keberlanjutan manfaatnya. Dalam konteks ini, bantuan tunai tidak hanya berfungsi sebagai alat konsumtif, tetapi juga sebagai modal awal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

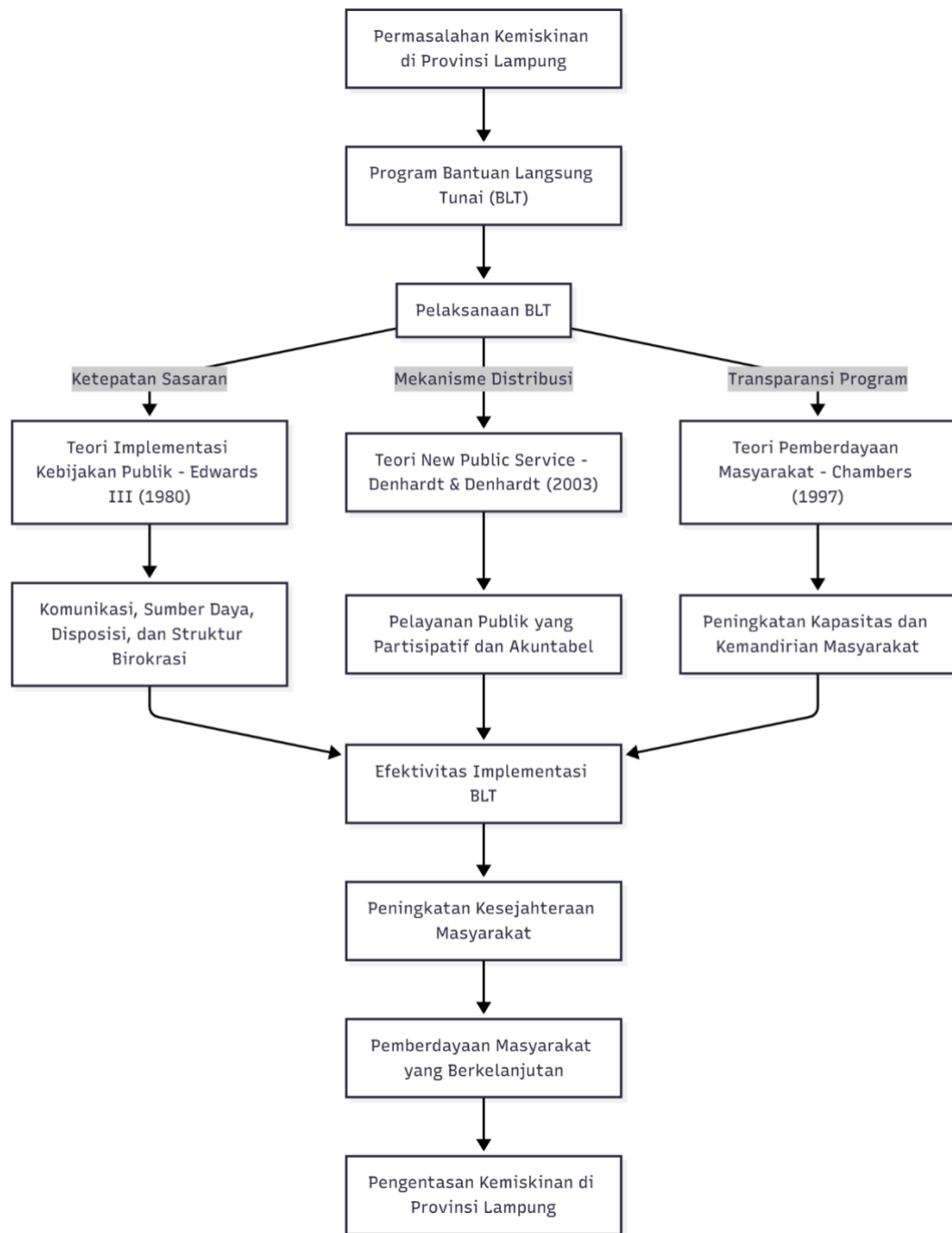
Beberapa penelitian sebelumnya mendukung hubungan antara pelaksanaan BLT dan pemberdayaan masyarakat. Anbiya (2025) dan Azizah (2024) menunjukkan bahwa efektivitas BLT sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Pratama et al. (2024) menekankan pentingnya integrasi antara BLT dan program pemberdayaan sosial agar bantuan tidak bersifat sementara. Sementara itu, Fatimawati dan Mulazid

(2022) menilai bahwa BLT perlu dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan karitatif. Penelitian lain oleh Kumala et al. (2024) dan Supriadi et al. (2021) juga menyoroti perlunya transparansi dan pembaruan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara pelaksanaan BLT sebagai variabel independen dan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat miskin sebagai variabel dependen. Pelaksanaan BLT mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan transparansi program. Dimensi-dimensi ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sesuai dengan teori implementasi kebijakan. Hasil dari pelaksanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mendorong proses pemberdayaan sebagaimana ditekankan dalam teori Chambers.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang komprehensif. Efektivitas Program BLT tidak hanya diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memperkuat partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pelaksanaan BLT yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel diyakini akan memberikan kontribusi yang signifikan. Kontribusi ini diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan pemberdayaan masyarakat di daerah ini.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam realitas sosial di balik pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemaknaan pengalaman sosial masyarakat berdasarkan pandangan dan konteks kehidupan mereka sendiri. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, peneliti berperan aktif dalam menggali makna dari fenomena sosial, bukan sekadar mengukur gejala melalui data statistik.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan sosial diterapkan di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat penerima. Menurut Soesana et al. (2023), pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara faktual dengan menekankan pemahaman terhadap proses dan dinamika yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu peneliti untuk menggambarkan bagaimana implementasi BLT dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta bagaimana masyarakat memahami dan memanfaatkan bantuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai karena isu kebijakan sosial seperti BLT bersifat kompleks dan sangat bergantung pada konteks sosial masyarakat. Fenomena ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif karena melibatkan nilai, persepsi, serta interaksi sosial antaraktor. Chambers (1997) menegaskan bahwa untuk memahami realitas masyarakat miskin diperlukan pendekatan yang partisipatif dan empatik agar suara mereka terwakili dengan adil dalam hasil penelitian. Oleh sebab itu, metode ini digunakan agar

peneliti mampu meninjau kebijakan dari perspektif masyarakat penerima manfaat, bukan semata dari pandangan pembuat kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik secara menyeluruh. Seperti dijelaskan oleh Edwards (1980), keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam pelaksanaan BLT di Provinsi Lampung. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi dasar yang paling tepat untuk menggali dan memahami dinamika implementasi kebijakan sosial secara mendalam, reflektif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Penetapan fokus ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan mendalam tanpa keluar dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa fokus penelitian dalam studi kualitatif berfungsi untuk memperjelas batasan masalah sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada fenomena yang paling relevan. Dalam konteks ini, fokus penelitian disusun untuk menelusuri hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan perubahan sosial yang muncul sebagai akibatnya.

Fokus pertama, yaitu pelaksanaan program BLT, dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana program BLT mampu dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat, mengacu pada teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Chambers (1997) serta

konsep yang dikembangkan oleh Pakpahan et al. (2024), yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, partisipasi aktif, dan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan kebijakan sosial.

Kedua fokus tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari efektivitas prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Fatimawati dan Mulazid (2022) menegaskan bahwa kebijakan sosial yang efektif adalah kebijakan yang tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta pola pikir masyarakat menuju kemandirian. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan administratif program BLT, melainkan juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pemahaman konteks lokal yang memengaruhi pelaksanaan BLT di Provinsi Lampung. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di setiap wilayah menyebabkan pelaksanaan kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan publik dalam mengatasi persoalan kemiskinan di tingkat daerah serta memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan fokus pengumpulan data pada sejumlah kabupaten dan desa yang telah menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara berkelanjutan sejak tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Soesana et al. (2023) menyatakan bahwa metode *purposive sampling* digunakan agar data yang diperoleh mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Provinsi Lampung dipilih karena masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif

tinggi, meskipun data menunjukkan adanya penurunan dalam beberapa tahun terakhir (BPS Lampung, 2024).

Secara sosial dan geografis, Lampung memiliki keunikan tersendiri karena mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir dengan tingkat kesejahteraan yang beragam. Keberagaman ini memungkinkan peneliti mengamati bagaimana kebijakan BLT diimplementasikan dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Beberapa wilayah yang menjadi fokus penelitian antara lain Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung. Ketiga daerah tersebut dipilih karena memiliki karakteristik penerima manfaat yang berbeda, mulai dari masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian hingga masyarakat perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang lebih beragam.

Pemilihan Provinsi Lampung juga dilandasi oleh perannya sebagai salah satu wilayah prioritas dalam distribusi bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah bagaimana BLT berkontribusi dalam meredam dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Selain itu, pemerintah daerah Lampung memiliki kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan desa, sehingga relevan untuk dikaji bersamaan dengan implementasi BLT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk narasi, pandangan, serta pengalaman subjektif dari para partisipan. Data ini tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan melalui deskripsi yang menafsirkan makna di balik pengalaman sosial yang terjadi. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa data kualitatif diperoleh dari sumber-sumber alami dengan tujuan memahami makna suatu fenomena, bukan untuk menghasilkan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggalian persepsi,

motivasi, dan pengalaman masyarakat mengenai pelaksanaan BLT sebagai kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat BLT, perangkat desa, serta pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasil penelitian terdahulu seperti Banawa et al. (2021), Purnawan et al. (2022), dan Khusran et al. (2025). Menurut Pratama et al. (2024), kombinasi antara data primer dan sekunder memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena menggabungkan pengalaman empiris dengan kerangka teori kebijakan publik.

Selain memperkaya analisis, data sekunder juga berperan sebagai pembanding terhadap temuan lapangan. Sebagai contoh, data kemiskinan yang dirilis oleh BPS Lampung (2024) digunakan untuk menilai sejauh mana program BLT berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam dan kontekstual, tetapi juga memiliki validitas akademik yang kuat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara terbuka agar para informan dapat mengungkapkan pandangan serta pengalaman mereka secara bebas. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa wawancara kualitatif bersifat fleksibel dan bertujuan untuk menggali makna yang tersembunyi di balik pengalaman partisipan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program BLT, pandangan aparat pelaksana mengenai proses implementasi, serta pengalaman penerima manfaat dalam menggunakan bantuan yang diterima.

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk proses distribusi, tingkat partisipasi masyarakat, serta pola komunikasi antara pelaksana dan penerima BLT. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap realitas sosial yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Menurut Soesana et al. (2023), observasi dalam penelitian kualitatif membantu peneliti memahami perilaku dan interaksi sosial secara alami tanpa mengubah konteks lingkungan yang sedang diamati. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan.

Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh berbagai data tertulis seperti daftar penerima bantuan, laporan realisasi anggaran, peraturan desa, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data dokumenter ini digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi hasil temuan dari wawancara maupun observasi. Dengan memadukan ketiga metode tersebut, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi guna meningkatkan akurasi serta keandalan data yang diperoleh. Pendekatan ini juga memperkuat validitas penelitian karena mampu menunjukkan kesesuaian dan konsistensi antara beragam sumber informasi yang digunakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga proses akhir penelitian. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa “analisis data kualitatif terdiri atas tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.” Proses analisis bersifat siklus, artinya peneliti dapat kembali ke lapangan untuk memperdalam, memperbarui, atau memverifikasi data apabila ditemukan ketidaksesuaian. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian tetap kontekstual dan mampu menggambarkan realitas sosial tanpa kehilangan makna yang sebenarnya.

Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi, yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, serta mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian akan dipertahankan, sedangkan yang tidak berkaitan disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana hasil reduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks tematik. Penyajian ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna dari data untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid, relevan, dan bermakna.

Menurut Soesana et al. (2023), analisis kualitatif tidak bersifat mekanis semata, melainkan membutuhkan refleksi mendalam terhadap makna di balik data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan antara implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan lapangan kemudian dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan Edwards (1980) dan konsep pemberdayaan masyarakat Chambers (1997) untuk menilai sejauh mana pelaksanaan BLT di Provinsi Lampung mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Proses analisis ini juga mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial di tiap wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh mencerminkan realitas empiris secara menyeluruh.

Selain itu, analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data (*concurrent analysis*). Banawa et al. (2021) menjelaskan bahwa analisis yang berjalan paralel dengan pengumpulan data memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara lebih mendalam. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya mengandalkan hasil wawancara akhir, tetapi juga dapat menyesuaikan fokus pertanyaan dan observasi berdasarkan temuan sementara di lapangan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa hasil interpretasi penelitian tetap kontekstual, reflektif, serta menggambarkan pengalaman autentik para partisipan secara komprehensif.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi unsur krusial dalam penelitian kualitatif karena menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menerapkan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari penerima BLT, aparat desa, serta pejabat pelaksana program. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang fenomena yang dikaji. Melalui langkah ini, peneliti dapat menilai konsistensi data dan memastikan keandalan temuan penelitian.

Selain triangulasi, penelitian ini juga menggunakan teknik *member check*, yaitu proses konfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sejalan dengan pandangan mereka. Menurut Soesana et al. (2023), *member check* memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan hasil penelitian agar benar-benar mencerminkan realitas sosial yang dialami partisipan. Proses ini juga berfungsi memperkuat hubungan saling percaya antara peneliti dan informan, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terbuka dan autentik. Dengan demikian, keabsahan temuan dapat dijaga melalui keterlibatan langsung dan umpan balik dari para partisipan penelitian.

Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menerapkan prinsip *dependability* dan *confirmability* sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2013). *Dependability* berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian yang dijaga melalui pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga analisis data. Sementara itu, *confirmability* menekankan objektivitas hasil penelitian dengan memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada data empiris, bukan pada opini atau bias peneliti. Prinsip ini diwujudkan dengan mendokumentasikan setiap langkah penelitian serta

membandingkan hasilnya dengan teori dan temuan terdahulu seperti yang dilakukan oleh Khusran et al. (2025) dan Pratama et al. (2024).

Selain itu, peneliti juga memperhatikan aspek *transferability*, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks sosial yang serupa. Untuk mencapainya, peneliti memberikan deskripsi terperinci mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Provinsi Lampung agar pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian dengan situasi di daerah lain. Melalui penerapan prinsip-prinsip keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, dapat dipercaya, dan memiliki kontribusi akademik serta praktis dalam kajian kebijakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anbiya, Y. A. (2025). *Pelaksanaan program BLT Desa Ngrupit dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. Repositori IAIN Ponorogo.
- Azizah, U. N. (2024). *Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Janti Slahung Ponorogo* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. Repositori IAIN Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, Juli 16). *Kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 2024*.
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWwTISZDNabVFUMDKjMw%3D%3D/number-and-percentage-of-poor-people-by-regency-municipality-in-lampung-province--2024.html>
- Banawa, S., Sarbi, S., & Zulmaizar, M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 122–131.
<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/pegguruang/article/view/2070>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications. <https://doi.org/10.3362/9781780440453>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
<https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa>
- Fatimawati, & Mulazid, A. S. (2022). *Analisis masalah kemiskinan dan kebijakan sosial*. Rajawali Pers.
- Jannah, L. M. (2022). Transfer kebijakan dan implementasi program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi*, 3(1), 45–58.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/7257>

- Khusran, H., Hasrul, Suryanef, & Al Rafni. (2025). Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Economics and Community Empowerment (JECCO)*, 5(1), 45–56. <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/659>
- Kumala, B., Ambarita, I., Simamora, I. B., Solihin, R. P., Devankha, A. S., & Saputro, A. E. (2024). Efektivitas penyaluran BLT dalam mengurangi kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Publik (JKP)*, 4(1), 67–80.
- Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, D. Y., Fauziah, A., Primafera, A., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., & Budaraga, I. K. (2024). *Konsep pemberdayaan masyarakat*. CV HEI Publishing Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/383493220_KONSEP_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT
- Pratama, M. Y. J., Mustain, A., & Jumroh, J. (2024). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin (Studi tentang program BLT mitigasi risiko pangan di Kota Palembang). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Kemasyarakatan (JIASK)*, 3(2), 98–110. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/204>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Perspektif*, 11(1), 78–90. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5700>
- Putra, M. A. P., Dirli, A. A., Andriani, W., & MauldyRaharja, R. (2023). Menggali efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam membantu masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 189–205. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/781>
- Rela, I. Z., Sitorus, S. A., Aldin, M., Arimbawa, P., Rosmawaty, Hasanuddin, S., Rachman, R. M., Wunawarsih, I. A., Pandarangga, A. P., Nikoyan, A., Wahyuni, S., Kimsan, M., & Musadar. (2024). *Pendekatan pemberdayaan masyarakat di era digital*. Yayasan Kita Menulis.

https://www.researchgate.net/publication/391392242_Pendekatan_Pemberdayaan_Masyarakat_Di_Era_Digital

Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, K., Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis. <https://www.scribd.com/document/770853575/Anisa-Buku-Metodologi-Penelitian-Kuantitatif>

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Supriadi, R. A., Astuti, M. W., Darina, S., Frediani, I., & Pigai, T. N. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: Studi kasus bantuan tunai di Provinsi Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(2), 56–70.

Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program Bantuan Langsung Tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/36278>

Wati, R. R., Basuki, P., & Suriadi, I. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. *Jurnal Oportunitas*, 5(1), 67–75. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/520>